

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

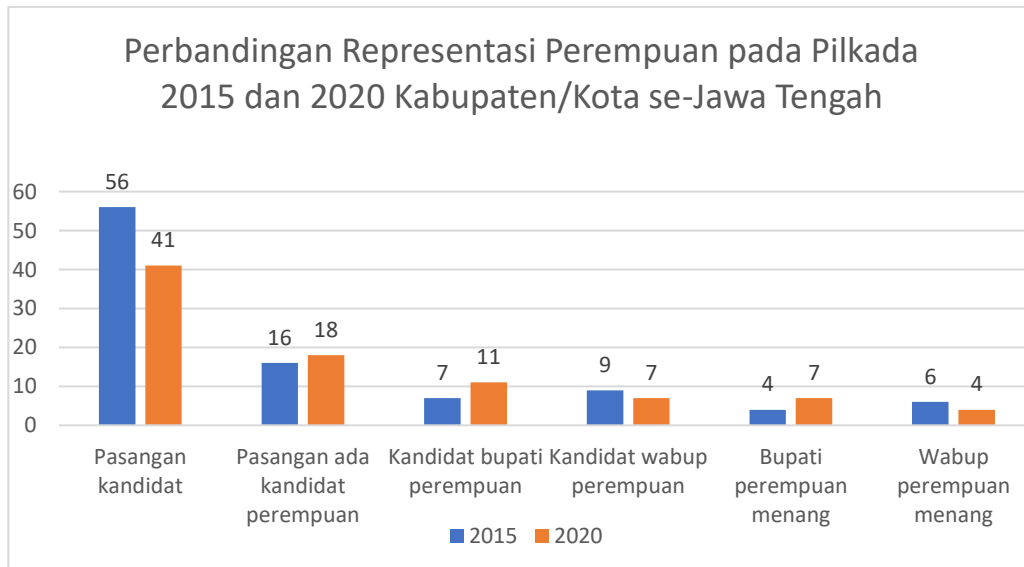
Perempuan selalu menjadi topik menarik untuk dibahas, seiring dengan dinamika masyarakat yang terus berubah, baik dari segi eksistensi, karakteristik, maupun tantangan yang mereka hadapi. Dahulu, ada harapan kuat agar perempuan bersikap feminin, patuh, tidak agresif, dan bersahaja. Model perempuan yang ideal adalah mereka yang sesuai dengan harapan sosial (Sihite, 2007). Jika seorang perempuan menyimpang dari ekspektasi ini, mereka seringkali dicap aneh, abnormal, atau dianggap melakukan penyimpangan. Peran utama perempuan saat itu diharapkan sebatas mengurus rumah tangga dan menjadi pelengkap serta pemanis dalam interaksi sosial. Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh sistem patriarki, yang secara historis memberikan keistimewaan pada satu jenis kelamin, yaitu laki-laki, menciptakan ketidakseimbangan relasi gender dalam berbagai aspek kehidupan (Marsya & Faladhin, 2019).

Sebagai "Kota Wali" dan pusat penyebaran Islam pertama di Jawa, Kabupaten Demak memiliki budaya yang sangat kental. Anggapan bahwa pemimpin haruslah laki-laki dan perempuan berperan sebagai "makmum" masih melekat kuat. Budaya patriarki ini terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada perempuan nelayan dan pesisir di Demak. Perjuangan mereka untuk diakui sebagai nelayan menunjukkan betapa kuatnya pengaruh patriarki yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, informasi, layanan publik, dan kesehatan.

Seiring waktu, konsep jati diri perempuan mulai menunjukkan kematangan dan kedewasaan, mendorong partisipasi mereka di ranah publik. Kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi, berkarir, bahkan terjun ke dunia politik semakin terbuka lebar. Namun, bukan hal mudah bagi seorang perempuan untuk mencalonkan diri dalam Pilkada, yakni proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pilkada memberikan hak suara dan kontrol kepada masyarakat dalam menentukan arah pemerintahan daerah, sekaligus memperkuat demokrasi di Indonesia. Proses ini juga membuka peluang bagi calon pemimpin dari berbagai latar belakang untuk bersaing, sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjamin setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Data Pilkada menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kontestasi politik masih memerlukan peningkatan, meskipun ada tanda-tanda positif. Pada Pilkada 2015 di 21 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, terdapat 56 pasangan kandidat. Sementara pada Pilkada 2020, jumlah pasangan kandidat menurun menjadi 41. Dari jumlah tersebut, hanya 18 pasangan (44%) yang melibatkan calon bupati dan wakil bupati perempuan, dengan 11 (27%) di antaranya adalah calon bupati perempuan. Angka ini memang menunjukkan bahwa keikutsertaan perempuan secara keseluruhan masih rendah, namun grafik perbandingan representasi perempuan pada Pilkada 2015-2020 di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah menunjukkan adanya peningkatan representasi perempuan.

Gambar 1.1 Perbandingan Representasi Perempuan pada Pilkada 2015 dan 2020 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah



Sumber : KPU

Grafik tersebut memperlihatkan bahwa data Pilkada menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik di Jawa Tengah, meskipun jumlahnya masih terbilang kecil. Pada Pilkada 2020, 18 dari 41 pasangan kandidat (44%) melibatkan calon bupati atau wakil bupati perempuan, angka ini naik signifikan dari Pilkada 2015 yang hanya 16 dari 56 pasangan (28,5%). Demikian pula, jumlah calon bupati perempuan meningkat dari 7 (12%) pada tahun 2015 menjadi 11 (27%) dari 41 calon bupati di Pilkada 2020. Ini mengindikasikan tren positif dalam representasi perempuan, meski mereka masih menghadapi tantangan.

Perempuan seringkali menghadapi hambatan budaya, struktur sosial-politik, dan berbagai stereotip yang menghambat keterlibatan mereka dalam politik. Salah satu "jalur cepat" bagi perempuan untuk masuk ke dunia politik adalah melalui kekerabatan atau koneksi dengan "orang kuat." Keterkaitan

antara politik kekerabatan dan peran orang kuat ini menunjukkan bahwa hubungan personal dan kekuasaan dapat menjadi sarana bagi perempuan untuk menembus batasan politik. Selain itu, partai politik, yang seharusnya berperan krusial dalam mencetak pemimpin berintegritas, seringkali dinilai masih belum optimal. Proses rekrutmen kandidat cenderung elitis, dan Pilkada acapkali berubah menjadi ajang pertarungan finansial. Praktik "pembelian" tiket pencalonan, dana kampanye, hingga pembelian suara menjadi fenomena umum dalam demokrasi lokal (Hartati, 2019).

Menurut Migdal (1988), kemunculan "orang kuat" atau *local strongman* seringkali berasal dari individu yang memiliki kekayaan dan mampu mengontrol sosial. Mereka kerap menempatkan diri dan kerabat pada posisi strategis untuk memastikan alokasi sumber daya berjalan sesuai kehendak mereka, bukan semata mengikuti aturan formal. Orang kuat lokal ini umumnya memanfaatkan tiga kekuatan utama: Kekuasaan Lokal (*Local Power*): Pengaruh mereka di tingkat lokal seringkali lebih dominan dan efektif dibandingkan pemerintah pusat. Kontrol Sosial (*Social Control*): Kemampuan mereka untuk membentuk dan mengarahkan perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Jaringan Patron-Klien (*Patron-Client Network*): Hubungan saling menguntungkan antara pemimpin politik, elite lokal, dan masyarakat yang dibangun atas dasar pertukaran sumber daya dan perlindungan, seringkali menghambat pembangunan negara yang kuat.

Beberapa contoh di Jawa Tengah menunjukkan pola ini. Dyah Hayuning di Purbalingga, seorang kader PDIP dan putri pemimpin PDIP setempat, dari wakil bupati kemudian menjabat bupati. Serupa, Sri Mulyani di

Klaten juga petahana yang naik dari wakil bupati, sekaligus istri mantan bupati dan pimpinan PDIP Klaten. Berbeda dengan keduanya, Sri Sumarni di Grobogan adalah kader PDIP yang merintis karir dari bawah, membangun jaringan kuat antaraktor. Ini menunjukkan bahwa perempuan dengan latar belakang keluarga politik, jaringan kuat, atau posisi petahana memiliki potensi besar untuk menduduki jabatan politik penting.

Kasus Eisti'anah dalam Pilkada Demak 2020 menjadi contoh menarik keterwakilan perempuan. Penting untuk dicatat bahwa Eisti'anah bukanlah Bupati perempuan pertama di Demak; gelar itu dipegang oleh Endang Setyaningdyah (2001-2006), yang sayangnya kemudian terlibat kasus korupsi APBD.

Proses pencalonan Eisti'anah di Pilkada Demak 2020 sendiri diwarnai dinamika politik yang signifikan, terutama dalam nominasi dan kandidasi pasangan calon. Tahapan ini sangat krusial, menentukan siapa yang akan bersaing memperebutkan jabatan publik. Meskipun banyak yang berambisi menjadi kepala daerah, tidak semua memiliki modal yang memadai. Mekanisme partai yang sering tertutup dalam nominasi dan kandidasi ini rentan terhadap praktik "mahar politik," yang berpotensi mendorong penyalahgunaan wewenang setelah menjabat.

Awalnya, Eisti'anah berpasangan dengan Joko Sutanto (petahana) sebagai Paslon 01, didukung koalisi besar PKB, PDI Perjuangan, Golkar, PAN, PPP, dan Demokrat. Sementara bakal Paslon 02 adalah Mugiyono dan M. Badruddin, diusung Gerindra dan Nasdem. Namun, KPU Demak menyatakan Joko Sutanto (bakal calon wakil bupati Eisti'anah) tidak memenuhi syarat

kesehatan (penglihatan) berdasarkan tes di RSUP Kariadi Semarang. Kondisi ini menyebabkan perubahan pasangan: Eisti'anah berpasangan dengan Ali Makhsun, yang mulanya adalah pesaing, sementara Badruddin mendampingi Mugiyono. Pada akhirnya, pasangan Eisti'anah-Ali Makhsun memenangkan Pilkada Demak 2020-2025 dengan perolehan 346.878 suara (56,82%), mengalahkan Mugiyono-M Badruddin yang mendapat 263.624 suara (43,18%).

Kemenangan Eisti'anah menarik untuk ditelaah. Sebagai seorang dokter yang relatif baru di kancah politik, kemampuannya menggeser figur senior PDIP di Demak tentu tidak lepas dari dukungan "orang kuat" di belakangnya. Tidak dapat dipungkiri, Eisti'anah adalah putri dari Noer Halim, seorang kontraktor sukses, Ketua KONI Demak, dan Ketua asosiasi GAPENSI. Sebagai Ketua GAPENSI Demak, Noer Halim memiliki posisi strategis dalam proyek-proyek konstruksi pemerintah daerah, menjadi mitra penting dalam penyediaan infrastruktur. Perannya di KONI juga menunjukkan kontribusinya dalam pengembangan olahraga.

Menurut Migdal (2001), dalam masyarakat, setiap kelompok memiliki pemimpin yang relatif otonom dari negara, dengan kapasitas sosial untuk menerapkan aturan sendiri. Ketika kontrol negara melemah (*weak state*), para strongman akan memperkuat kekuasaan mereka di tingkat lokal. Dalam politik, figur seperti ini berperan penting dalam mendukung pencalonan kandidat (Hutabarat, 2012). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan salah satu mekanisme demokratis yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk secara langsung menentukan pemimpin daerahnya. Akan tetapi, proses

ini tidak semata-mata berlangsung dalam ranah formal atau prosedural. Dalam praktiknya, Pilkada sering kali melibatkan aktor-aktor informal yang memiliki pengaruh besar terhadap proses politik, seperti tokoh masyarakat, pengusaha lokal, hingga figur yang dikenal sebagai *orang kuat* atau *local strongman*. Mereka memainkan peran penting dalam menentukan arah pencalonan, membentuk koalisi kekuasaan, serta mengarahkan dukungan massa.

Dengan melihat dinamika politik lokal pada Pilkada Demak 2020, dilihat bahwa kemenangan Eisti'anah tidak semata ditentukan oleh kualitas personal maupun mekanisme formal partai, melainkan sangat dipengaruhi oleh kekuatan finansial dan jejaring sosial-politik ayahnya, Noer Halim. Sebagai seorang *local strongman*, Noer Halim mampu mengkonversi modal ekonomi menjadi pengaruh politik yang efektif melalui strategi patronase dan mobilisasi dukungan lintas sektor. Dominasi peran aktor informal ini mencerminkan bagaimana kekuasaan dalam politik lokal tidak hanya dibentuk oleh struktur formal, tetapi juga oleh kontrol sosial dan kekuatan modal yang dijalankan di balik layar.

Penelitian ini untuk memahami bagaimana kekuasaan informal bekerja dalam politik lokal, dengan menelaah secara khusus peran orang kuat dalam menentukan hasil Pilkada. Kajian ini penting tidak hanya dalam ranah akademik karena menawarkan kontribusi terhadap pemahaman teori kekuasaan dan patronase tetapi juga dalam ranah praktis, sebagai refleksi kritis terhadap tantangan demokrasi lokal di Indonesia yang kerap dibentuk oleh dominasi aktor-aktor informal yang tak tersentuh oleh mekanisme pengawasan formal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan tinjauan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada beberapa pertanyaan inti, yaitu:

1. Bagaimana orang kuat beroperasi dalam kemenangan Eisti'anah pada Pilkada Kabupaten Demak tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana figur orang kuat (*local strongman*) beroperasi dalam mendukung kemenangan Eisti'anah pada Pilkada Kabupaten Demak tahun 2020, dengan menempatkan fokus pada dinamika kekuasaan informal, kontrol sosial, dan praktik patron-klien. Dalam konteks ini, tokoh Noer Halim sebagai elite lokal diposisikan sebagai pusat analisis, untuk mengungkap sejauh mana kekuatan non-lembaga (non-institusional) mampu membentuk dan memengaruhi jalannya kontestasi politik lokal.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoritis maupun praktis:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian ilmu politik, khususnya dalam studi tentang kekuasaan lokal, demokrasi elektoral, dan peran orang kuat lokal dalam politik daerah. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kekuasaan dalam masyarakat tidak hanya dijalankan oleh negara melalui institusi formal, tetapi juga oleh figur-figur lokal yang memiliki kontrol atas sumber daya dan jaringan

sosial-politik. Penelitian ini juga memperdalam pemahaman tentang bagaimana orang kuat memanfaatkan pengaruh untuk mendapat dukungan politik, mobilisasi massa, dan legitimasi sosial yang menopang dominasi aktor informal.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam tata kelola demokrasi lokal, seperti penyelenggara pemilu, partai politik, lembaga pengawas pemilu, serta masyarakat sipil. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi upaya memperkuat integritas demokrasi lokal dengan menyoroti peran kekuasaan informal yang sering kali tidak terpantau oleh mekanisme formal, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilihan kepala daerah. Secara keseluruhan, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi terhadap praktik demokrasi lokal yang ideal, sekaligus memperkuat kesadaran tentang pentingnya pengawasan terhadap dinamika kekuasaan di luar institusi formal yang dapat memengaruhi proses demokratisasi secara substantif.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan mencapai tujuan dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa studi sebelumnya yang relevan. Tinjauan literatur ini sangat penting untuk memandu analisis dan mencapai hasil yang optimal. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan adalah sebagai berikut:

Holifah (2018), dalam penelitiannya "Kekuatan *Local Strongman* dalam Pilkada Sampang 2012", menunjukkan bahwa keterlibatan dan pengaruh blater (istilah untuk "orang kuat lokal" di Madura) dalam perpolitikan, khususnya di Kabupaten Sampang, sangat signifikan. Kemenangan pasangan calon bupati Fannan-Fadhilah pada Pilkada Sampang 2012 disebut tidak terlepas dari peran "orang kuat lokal" di wilayah kekuasaan masing-masing yang mampu mengarahkan pilihan suara masyarakat sesuai arahan mereka.

Paraisu (2016), dalam penelitiannya "Peran *Local Strongman* Dalam Pemilihan Kepala Desa Ramdori Kecamatan Swandiwe Kabupaten Biak Numfor", menunjukkan bahwa kemenangan kandidat dalam pemilihan kepala desa di Desa Ramdori tidak semata-mata ditentukan oleh preferensi individu pemilih, melainkan sangat dipengaruhi oleh kekuatan figur *local strongman*, yakni Kepala Suku Keret atau yang dikenal dengan sebutan Mambri. Sosok ini memiliki kapasitas besar untuk membentuk pandangan politik masyarakat dan mengarahkan pilihan mereka melalui penggunaan modal simbolik (pengaruh budaya dan kewibawaan), modal sosial (jejaring dan loyalitas), serta modal ekonomi (dukungan finansial dan sumber daya lainnya). Dengan kekuatan tersebut, Mambri mampu memastikan kemenangan kandidat yang ia dukung, memperlihatkan betapa dominannya peran aktor informal dalam proses politik lokal di desa tersebut.

Taekab, Y. K. (2018)., dalam penelitiannya "CALON TUNGGAL DAN ORANG KUAT LOKAL DALAM PILKADA

SERENTAK (Studi Tentang Sumber-Sumber Kekuatan Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2015)” menunjukkan bahwa munculnya hanya satu pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Timor Tengah Utara tidak terlepas dari dominasi kekuatan yang dimiliki oleh sosok petahana, yang juga merupakan *orang kuat lokal*. Beberapa faktor utama yang mendorong situasi ini adalah kuatnya pengaruh politik dan sosial dari calon petahana di tingkat lokal, keterlibatan birokrasi dalam proses politik (politisasi birokrasi), serta persepsi masyarakat terhadap keberhasilan kepemimpinan pada masa jabatan sebelumnya. Kombinasi dari faktor-faktor ini membuat aktor-aktor politik lain enggan mencalonkan diri, sehingga kompetisi politik hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja.

Ikmal, N. M. (2018), dalam penelitiannya “PATRONASE POLITIK DALAM PEMERINTAH LOKAL (Studi Kekuatan *Local Strongman* di Kabupaten Probolinggo)” menunjukkan bahwa praktik patronase politik di tingkat pemerintahan daerah sangat berkaitan erat dengan melemahnya fungsi negara. Dalam konteks ini, *local strongman* seperti Hasan Aminuddin memainkan peran sentral dalam membentuk dan mempertahankan jaringan kekuasaan melalui pola hubungan patron-klien. Ia berhasil mengukuhkan dominasinya baik terhadap masyarakat maupun partai politik, dengan menciptakan sistem klientelisme yang menjaga kelangsungan pengaruh politiknya. Dalam sistem ini, masyarakat cenderung memilih untuk patuh daripada melawan, terutama karena elite patron mampu mengendalikan sumber daya ekonomi lokal. Akibatnya,

kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat kurang menjadi prioritas, sementara pola politik dinasti terus berkembang sebagai budaya baru dalam politik lokal.

Handoko (2020), dalam penelitiannya "*Fenomena Local Strongman* (Studi Kasus Pengaruh Sukarmis Dalam Mendukung Kemenangan Andi Putra Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kuantan Singingi)", menunjukkan bahwa fenomena "orang kuat lokal" dalam politik tidak hanya melibatkan figur di luar struktur pemerintahan atau politik formal. Sebaliknya, "orang kuat lokal" juga bisa berperan dalam struktur politik dan sebagai pengusaha. Kemenangan Andi dalam kontestasi DPR RI tidak dapat dipisahkan dari pengaruh Sukarmis, yang dianggap sebagai politisi senior dan tokoh berpengaruh di Kabupaten Kuantan Singingi, diperkuat oleh fakta bahwa Andi adalah putra Sukarmis.

Saputri, R. A., & Febriani, L. (2021), dalam penelitiannya "Strategi Orang Kuat Lokal dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi pada Pemenangan Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bangka)" menunjukkan bahwa dalam proses Pemilu Legislatif 2019 di daerah pemilihan 4 Kabupaten Bangka, keterlibatan *orang kuat lokal* menjadi salah satu faktor kunci dalam upaya kemenangan calon legislatif. Tokoh-tokoh tersebut umumnya berasal dari kalangan agama serta pelaku usaha, yang memiliki pengaruh kuat dalam komunitasnya. Peran utama mereka mencakup penyusunan strategi segmentasi pemilih berdasarkan wilayah geografis, penentuan kelompok sasaran seperti kalangan ibu rumah tangga, lansia, hingga jamaah majelis taklim, serta kemampuan

mereka dalam menggerakkan massa secara besar-besaran dalam kegiatan kampanye. Para *local strongman* ini tidak hanya menjadi penghubung antara kandidat dan masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk opini publik. Selain itu, hubungan antara caleg dan *orang kuat lokal* bersifat timbal balik. Para *strongman* ini memperoleh imbalan dalam bentuk akses ekonomi dan politik, seperti diberikannya posisi tertentu kepada anggota keluarga mereka atau dibukanya peluang kerja sama ekonomi antara keduanya pasca pemilu.

Ridho, M. Z. (2023), dalam penelitiannya “*Local Strongman di Bangkalan: Kuasa Politik “Blater” Dalam Demokrasi Lokal 2008-2018*” menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah telah melahirkan figur-figur orang kuat lokal yang memiliki pengaruh besar terhadap jalannya pemerintahan dan kontestasi politik daerah. Di Bangkalan, keberadaan blatèr menciptakan relasi kuasa berbentuk segitiga antara birokrat, politisi, dan elite non-formal. Jaringan kekuasaan ini tidak hanya bersifat politik, namun juga melibatkan aspek sosial, budaya, ekonomi, bahkan unsur kekerasan yang dilembagakan secara informal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami mengapa blatèr terlibat aktif dalam pemilihan kepala daerah, serta bagaimana mereka membangun dominasi politik di tingkat lokal. Figur seperti Fuad Amin menjadi contoh konkret bagaimana seorang *local strongman* mampu mengonsolidasikan kekuasaan melalui hubungan patronase, jaringan kekeluargaan, dan kekuatan sosial-budaya. Fuad Amin tercatat berhasil menduduki jabatan strategis, seperti anggota DPR RI dan Bupati

Bangkalan selama dua periode. Temuan ini memperkuat argumen bahwa dalam konteks politik lokal Indonesia, orang kuat lokal memainkan peran sentral dalam membentuk arah dan struktur kekuasaan daerah.

Kristono, R. (2024), dalam penelitiannya *“Local Strongman and Political Dynasty: Political Economic Analysis of Aang Hamid Suganda in Kuningan Regency”* menunjukkan bahwa Aang Hamid Suganda (AHAS) merupakan figur orang kuat lokal (*local strongman*) yang berasal dari latar belakang pengusaha sukses dan juga kader partai politik pemenang di Kuningan, yakni PDIP. Kiprah politiknya yang berhasil menjabat sebagai bupati selama dua periode turut mengangkat elektabilitas partai tersebut di tingkat lokal. Keberhasilan AHAS menciptakan basis dukungan politik yang kuat menjadikannya pusat kekuasaan lokal yang mampu membangun dinasti politik keluarga secara berkelanjutan tanpa adanya penolakan yang berarti dari masyarakat. Dominasi politik keluarga AHAS dipertahankan melalui strategi politik yang terukur, prestasi dalam pembangunan daerah, serta pengaruh sosial yang luas dan kuat. Hal ini menunjukkan bahwa pewarisan kekuasaan secara turun-temurun dapat berlangsung mulus jika disertai dengan legitimasi politik yang kuat dan keterikatan sosial yang mengakar dalam komunitas lokal.

Akbar, F., Suaib, E., & Supiyah, R. (2024), dalam penelitiannya *“PERTARUNGAN DAN KONTESTASI “BOS LOCAL” PADA BAKAL CALON PILWALI TAHUN 2024 DI KOTA KENDARI”* menunjukkan bahwa pengaruh *local boss* atau orang kuat lokal sangat besar, terutama yang berasal dari latar belakang sebagai

kepala suku, tuan tanah, atau pemimpin adat. Mereka memiliki posisi dominan dalam kehidupan masyarakat sekitar sehingga berpotensi besar memengaruhi jalannya Pemilu 2024. Di sisi lain, tokoh-tokoh lokal yang memiliki latar belakang sebagai mantan kepala daerah, anggota legislatif, atau pengusaha juga memegang peran signifikan. Hal ini dikarenakan mereka umumnya memiliki kekayaan yang mencolok dibanding masyarakat biasa, serta kerap memberikan bantuan sosial, donasi, maupun jaminan keamanan. Kondisi tersebut membuat warga merasa berkewajiban untuk mematuhi dan mengikuti arahan dari para *local strongman* tersebut, meski secara tidak langsung.

Syababum (2023), dalam "Peran *Local Strongman* Dalam Kontestasi Pilkada Kota Subulussalam Tahun 2018", mengidentifikasi Basirun Harahap sebagai "orang kuat lokal" yang sangat berpengaruh di Kota Subulussalam, dikenal karena kekayaan dan jiwa sosialnya yang tinggi. Karakteristik ini membuat sosok "orang kuat" tersebut memiliki dampak besar terhadap perolehan suara dalam Pilkada, karena masyarakat sangat menghormati dan mempercayainya.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *local strongman* atau orang kuat lokal memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan hasil kontestasi politik di tingkat lokal di Indonesia. Mereka hadir dalam berbagai bentuk seperti pengusaha, tokoh agama, kepala suku, mantan pejabat, atau elite sosial yang memiliki kekuatan ekonomi, jaringan sosial, dan pengaruh budaya yang luas. Dengan memanfaatkan modal finansial, simbolik, dan sosial, mereka mampu memengaruhi partai politik,

mengatur pencalonan kandidat, hingga mengarahkan pilihan politik masyarakat melalui praktik patron-klien dan klientelisme. Dalam banyak kasus, kekuatan informal ini bahkan lebih dominan dibandingkan kekuatan formal negara, menciptakan situasi di mana proses demokrasi berlangsung secara prosedural namun dikendalikan oleh kepentingan elite lokal. Fenomena ini juga mendorong lahirnya politik transaksional, politik dinasti, hingga munculnya calon tunggal, yang semuanya menunjukkan lemahnya institusi politik dan tingginya ketergantungan pada figur individual yang berpengaruh. Oleh karena itu, peran *local strongman* menjadi kunci dalam memahami dinamika kekuasaan dan arah politik lokal di Indonesia.

1.5.2. Landasan Teori

1.5.2.1. Teori *Local Strongman*

Kehadiran kelompok atau institusi informal yang beroperasi di luar struktur pemerintahan seringkali dapat mengikis efektivitas dan kapasitas negara. Ini terjadi karena individu-individu yang berkuasa dengan reputasi dan pengaruh yang kuat memiliki kemampuan untuk mengendalikan serta memengaruhi elit-elit berwenang, termasuk pejabat formal, agar tunduk pada keputusan dan aturan yang mereka tetapkan. Fenomena ini muncul karena adanya "orang kuat lokal" (*local strongman*), sebuah konsep yang merujuk pada kekuatan informal. Mereka bisa jadi adalah tuan tanah, rentenir, pengusaha, kepala suku, panglima perang, "bos", atau petani kaya yang berupaya mendominasi

masyarakat di suatu wilayah tertentu dengan membangun dan memanfaatkan jaringan kolaborasi mereka.

Analisis yang disampaikan oleh Joel S. Migdal, berdasarkan observasi kondisi politik riil, seperti kemunculan kelompok atau lembaga informal di luar kerangka negara yang mengurangi efektivitas dan kapasitas negara, menunjukkan bahwa kelemahan negara-negara dunia ketiga telah memicu lahirnya individu-individu berkuasa di tingkat lokal. Migdal secara spesifik menyebut individu-individu ini sebagai "*local strongman*" dalam karyanya *Strong Societies and Weak States*.

Secara konseptual, orang kuat lokal secara jelas didefinisikan sebagai kekuatan informal, yang mencakup figur seperti tuan tanah, tengkulak, industrialis, kepala suku, panglima perang, bos, petani kaya, atau pemimpin klan, yang berupaya memonopoli kendali atas masyarakat di wilayah tertentu melalui jalinan kerja sama yang mereka bangun. Samsa (2020) mengemukakan bahwa keberhasilan orang kuat lokal dalam membangun dan mempertahankan kekuasaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, jaringan kekuasaan mereka sangat bergantung pada sistem elektoral, di mana sistem proporsional terbuka cenderung memfasilitasi pertumbuhan "orang kuat lokal". Kedua, mereka umumnya berasal dari kalangan dengan kemapanan ekonomi; semakin besar kemampuan mereka mengonversi modal ekonomi menjadi modal sosial, semakin kuat pula kontrol sosial yang mereka miliki. Ketiga, jaringan kekuasaan mereka dapat berkembang

jika modal sosial yang diperoleh berhasil diubah menjadi modal politik. Keempat, kontrol sosial yang lebih besar akan memperluas pengaruh jaringan kekuasaan mereka. Kelima, keberlangsungan kekuatan "orang kuat lokal" bergantung pada kontrol sosial internal yang mereka miliki.

Orang kuat lokal seringkali ditemukan di negara-negara di Asia dan Afrika, dan analisis mendalam tentang dinamika hubungan antara negara dan masyarakat lokal di negara berkembang. Meskipun Joel S. Migdal tidak secara spesifik menyebutkan "negara berkembang" dalam bukunya *Strong Societies and Weak States*, ia membahas beberapa contoh negara yang menghadapi tantangan dalam membangun kekuatan negara, seperti Sierra Leone, Sri Lanka, India (khususnya di negara bagian Uttar Pradesh), dan Meksiko. Migdal juga menyertakan contoh negara yang relatif berhasil membangun kekuatan negara, seperti Korea Selatan dan Singapura. Penting untuk diingat bahwa Migdal tidak membatasi definisi "negara berkembang" hanya pada negara-negara tersebut; fokus utamanya adalah pada analisis konseptual dan teoretis tentang interaksi antara negara dan masyarakat lokal.

Negara-negara ini umumnya merupakan negara yang baru memperoleh kemerdekaan dengan infrastruktur hukum dan kelembagaan yang terbatas. Setidaknya, penetrasi negara oleh "orang kuat lokal" telah menyebabkan ketidakstabilan politik, yang secara tidak langsung meningkatkan kehadiran mereka di mata politisi dan pelaksana (istilah Migdal untuk pejabat pemerintah pusat lokal yang

dijadikan mitra, jaringan patronase, atau agen kepentingan mereka saat pemilihan). Akibatnya, figur-figur berkuasa ini memiliki akses langsung terhadap sumber daya ekonomi yang dialokasikan oleh politisi dan pelaksana. Tidak jarang "orang kuat" ini berhasil melobi untuk menempatkan kerabat mereka di posisi pemerintahan guna memastikan bahwa sumber daya proyek ekonomi yang diberikan tidak jatuh ke tangan pihak lain.

Selain gambaran negara sebagai wadah bagi berbagai kepentingan organisasi sosial yang saling bersaing untuk menguasai kontrol sosial dalam masyarakat, juga muncul fenomena negara lemah sebagai konsekuensi dari kekalahan negara oleh kekuatan-kekuatan informal di luar institusi resmi. Konsep Migdal tentang "negara lemah" setidaknya merupakan evaluasi ulang terhadap premis idealis Weber, yang mendefinisikan negara sebagai satu-satunya entitas politik yang memonopoli kekerasan dalam masyarakat. Migdal berpandangan bahwa negara bukanlah satu-satunya organisasi yang berdampingan dengan masyarakat. Di luar negara, terdapat banyak organisasi lain yang berupaya menjalankan dan menanamkan kontrol serta pengaruh dengan cara serupa seperti negara. Metode mereka tidak hanya menawarkan insentif dalam bentuk bantuan dan jaminan, tetapi juga menjatuhkan sanksi sosial, termasuk tindakan kekerasan dan pengusiran, bagi mereka yang tidak patuh. Menjamurnya begitu banyak organisasi di luar negara memaksa masyarakat untuk membuat pilihan

sulit mengenai organisasi mana yang benar-benar mampu mendorong strategi bertahan hidup mereka.

Migdal meyakini bahwa keberadaan kelompok dan organisasi informal di luar struktur negara, yang mengurangi efektivitas dan kapasitas negara, disebabkan oleh eksistensi "orang kuat lokal". Secara konseptual, "orang kuat lokal" didefinisikan sebagai "kekuatan informal, baik dalam bentuk tuan tanah, tengkulak, industrialis, kepala suku, panglima perang, bos, petani kaya, atau pemimpin klan, yang berupaya memonopoli kontrol atas masyarakat di suatu wilayah tertentu melalui kerja sama jaringan yang mereka bangun." Dalam konteks "orang kuat lokal" ini, siapa pun yang berupaya meraih posisi dalam politik tentu sangat bergantung pada figur-figur tersebut. Hal ini karena, seperti yang dijelaskan sebelumnya, jaringan yang luas dan pengaruh signifikan di suatu wilayah menjadi pendorong utama bagi seseorang untuk memenangkan suara. Tanpa relasi yang luas, seseorang tentu tidak akan memiliki dampak politik sebesar yang diharapkan.

Konsep-Konsep Kunci dalam Teori *Local Strongman* Joel S. Migdal dalam menjelaskan relasi yang dibangun oleh "orang kuat lokal", Joel S. Migdal dalam bukunya *Strong Societies and Weak States* membahas beberapa konsep kunci sebagai berikut:

1. Kekuasaan Lokal (*Local Power*)

Konsep ini sangat berkaitan dengan gagasan bahwa kekuasaan di tingkat lokal seringkali lebih berpengaruh dan efisien

dibandingkan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Migdal berpendapat bahwa di banyak negara dengan kondisi negara yang lemah, aktor atau entitas lokal, seperti pemimpin desa, tokoh masyarakat, atau pengusaha lokal yang mengembangkan kekuasaan, dapat menjadi sangat dominan. Mereka mengontrol sumber daya vital dan mampu menyediakan layanan atau perlindungan bagi masyarakat, yang pada akhirnya menyaingi kapasitas negara untuk melakukan hal serupa. Beberapa elemen penting terkait dengan konsep *local power* dalam pandangan Migdal meliputi:

- Desentralisasi Kekuasaan: Dalam masyarakat dengan negara yang lemah, kekuasaan tidak terpusat pada pemerintah pusat. Sebaliknya, kekuasaan lebih banyak dipegang oleh aktor lokal yang dapat bertindak lebih langsung dan efektif. Pemerintah pusat seringkali tidak mampu atau enggan hadir di seluruh wilayah, sehingga para pemimpin lokal mengisi kekosongan tersebut dengan cara mereka sendiri.
- Hubungan Patronase: Kekuasaan lokal seringkali bergantung pada hubungan patronase, di mana seorang pemimpin lokal memberikan sumber daya atau perlindungan kepada individu atau kelompok tertentu sebagai imbalan atas dukungan atau kesetiaan mereka. Hubungan patronase ini menciptakan ikatan yang kuat antara pemimpin lokal dan masyarakat, bahkan lebih kokoh daripada hubungan antara masyarakat dengan pemerintah pusat.

- Kekuasaan yang Tidak Formal: Kekuasaan lokal seringkali tidak terorganisir secara formal dan lebih bersifat personalistik, daripada berdasarkan hukum atau kebijakan negara. Pemimpin lokal seringkali memiliki pengaruh yang lebih besar daripada pejabat pemerintah pusat karena akses langsung mereka ke sumber daya yang sangat dibutuhkan masyarakat.
- Alternatif bagi Negara: Ketika pemerintah pusat gagal menyediakan layanan dasar seperti perlindungan atau infrastruktur, masyarakat seringkali mencari solusi melalui aktor lokal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini menciptakan situasi di mana pemerintah pusat terpinggirkan, dan kekuasaan lokal menjadi metode utama untuk mengatur kehidupan sosial dan politik.

Dalam kerangka ini, *local power* tidak hanya menunjukkan siapa yang mengendalikan suatu wilayah, tetapi juga menggambarkan distribusi kekuasaan yang lebih tersebar di luar kendali negara. Hal ini mengarah pada terbentuknya struktur sosial yang lebih kompleks, di mana aktor-aktor lokal berperan dalam pembentukan kebijakan, merespons kebutuhan masyarakat, dan bahkan bertindak lebih efektif daripada pemerintah pusat yang lemah. Migdal menegaskan dalam bukunya bahwa meskipun negara pusat mungkin dianggap lemah, masyarakat lokal yang kuat dan terorganisir dapat tetap menjaga stabilitas sosial dan politik di

tingkat lokal, meskipun dengan cara yang berbeda dibandingkan negara-negara yang lebih kuat.

2. Kontrol Sosial (*Social Control*)

Konsep social control yang diperkenalkan oleh Joel S. Migdal dalam *Strong Societies and Weak States* (1988) mengacu pada kemampuan suatu aktor (terutama negara) untuk membentuk dan mengarahkan perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Migdal menggunakan konsep ini untuk menjelaskan mengapa beberapa negara menunjukkan kelemahan dalam menjalankan otoritasnya dibandingkan dengan kekuatan sosial lain yang ada dalam masyarakat. Migdal mengidentifikasi tiga elemen utama yang menentukan sejauh mana sebuah negara atau aktor lain dapat menjalankan social control:

- Kepatuhan (*Compliance*): Mengukur sejauh mana individu atau kelompok mematuhi aturan yang ditetapkan oleh negara atau pemegang kekuasaan lainnya. Kepatuhan ini dapat dicapai melalui tekanan koersif, pemberian insentif ekonomi, atau pembentukan norma sosial yang diterima masyarakat.
- Partisipasi (*Participation*): Berkaitan dengan kemampuan negara atau aktor lain dalam melibatkan masyarakat ke dalam berbagai institusi dan mekanisme yang telah mereka bangun. Contoh konkret dari partisipasi ini adalah keterlibatan warga dalam sistem perpajakan, pendidikan, atau struktur administratif negara.

- Legitimasi (*Legitimacy*): Menunjukkan sejauh mana masyarakat mengakui dan menerima negara atau aktor tertentu sebagai otoritas yang sah. Legitimasi dapat diperoleh jika negara berhasil menyediakan layanan publik, membangun identitas nasional, atau menciptakan norma yang diakui dan diterima secara luas oleh masyarakat.

Pemikiran Migdal ini memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami kegagalan negara dalam membangun institusi yang kuat. Ia menekankan bahwa tantangan utama bagi suatu negara bukan hanya terletak pada kapasitas administratif atau perkembangan ekonomi, tetapi juga pada kemampuannya untuk bersaing dengan aktor sosial lainnya dalam memperoleh kepatuhan, partisipasi, dan legitimasi dari rakyatnya.

3. Jaringan Patron-Klien (*Patron-Client Network*)

Joel S. Migdal memperkenalkan konsep *Patron-Client Network* dalam bukunya *Strong Societies and Weak States* (1988) untuk menjelaskan bagaimana hubungan kekuasaan terbentuk dalam negara-negara dengan kontrol sosial yang lemah. Konsep ini menyoroti bagaimana pemimpin politik, elit lokal, dan masyarakat membangun hubungan berdasarkan pertukaran sumber daya dan perlindungan, yang seringkali menghambat pembentukan negara yang kuat. Jaringan Patron-Klien adalah sistem hubungan timbal balik antara patron (pelindung) dan klien, yang didasarkan pada pertukaran sumber daya, perlindungan, serta kesetiaan. Dalam mekanisme ini Patron biasanya

menawarkan perlindungan, pekerjaan, atau akses ke fasilitas negara kepada klien mereka. Mereka adalah elit politik, pemimpin lokal, atau pejabat negara yang memiliki kekuasaan dan sumber daya. Klien adalah individu atau kelompok masyarakat yang bergantung pada patron untuk mendapatkan akses ke sumber daya, keamanan, atau keuntungan lainnya. Sebagai imbalannya, mereka memberikan loyalitas politik atau dukungan lainnya kepada patron.

Konsep-konsep ini membantu menjelaskan bagaimana "orang kuat lokal" (*Local Strongman*) dapat mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di daerah mereka. "Orang kuat lokal" adalah pemimpin lokal yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar di daerahnya, seringkali melalui kontrol atas sumber daya ekonomi dan politik. Dalam penelitian ini, teori ini akan digunakan sebagai kerangka kerja konseptual yang menghubungkan berbagai gagasan dan membantu menjawab pertanyaan penelitian secara teoritis.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Dalam konteks relasi yang dijalin oleh "orang kuat lokal", Joel S. Migdal dalam karyanya *Strong Societies and Weak States* menguraikan beberapa konsep fundamental. Konsep-konsep ini mencakup: Kekuasaan Lokal (*Local Power*), yang mengacu pada kemampuan pemimpin di tingkat lokal untuk menguasai sumber daya dan mengambil keputusan yang berdampak pada komunitas setempat; Kontrol Sosial (*Social Control*), yaitu kapasitas pemimpin lokal untuk memengaruhi perilaku dan tindakan masyarakat di wilayahnya; dan Jaringan Patron-Klien (*Patron-*

Client Network), sebuah sistem hubungan timbal balik antara pemimpin lokal dan masyarakat yang didasari pada pertukaran barang, jasa, serta loyalitas. Ketiga konsep ini sangat vital dalam menjelaskan bagaimana seorang Local Strongman mampu mempertahankan dominasi dan pengaruhnya di suatu daerah. Untuk mengoptimalkan kolaborasi dari ketiga elemen ini, diperlukan strategi yang matang serta penguatan baik dari internal maupun eksternal tim, guna memastikan pencapaian tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah mekanisme demokratis di mana rakyat secara langsung memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Melalui proses ini, masyarakat diberikan hak suara dan kendali penuh dalam menentukan arah pemerintahan di wilayahnya. Pilkada memainkan peranan krusial dalam mengukuhkan demokrasi di Indonesia, membuka kesempatan bagi calon pemimpin dari berbagai latar belakang untuk berkompetisi dan menyuarakan visi misi mereka kepada publik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, setiap warga negara dijamin haknya untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Proses Pilkada melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara. Pada tahun 2020, Indonesia serentak menyelenggarakan Pilkada di 270 daerah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang kabupaten/kotanya turut serta dalam Pilkada serentak

tersebut, dengan total 21 wilayah yang melaksanakan pemilihan. Kabupaten Demak menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah yang berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2020, menjadikannya sarana penting bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam politik lokal.

1.7. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

1.8. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa pencalonan Eisti'anah dalam Pilkada Demak 2020 tidak dapat dilepaskan dari peran seorang figur berpengaruh di belakangnya, yaitu ayahnya, Noer Halim. Noer Halim dikenal sebagai kontraktor sukses yang memiliki kontribusi signifikan dalam sektor pembangunan di Kabupaten Demak dan aktif dalam berbagai

organisasi lokal. Ia menjabat sebagai Ketua GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Demak dan juga Ketua KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Demak.

Keberadaan kekuasaan (*power*), kontrol sosial (*social control*), dan jaringan yang dimiliki oleh Noer Halim diyakini sangat memengaruhi seluruh proses pencalonan hingga mendukung kemenangan Eisti'anah pada Pilkada 2020. Meskipun Eisti'anah terbilang pendatang baru di kancah politik dan kurang pengalaman serta jaringan, ia berhasil menembus barisan politisi senior di partai dan mendapatkan rekomendasi dari DPD partai untuk maju dalam Pilkada Demak, padahal ayahnya (Noer Halim) tidak memiliki keanggotaan formal di partai tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya pengaruh kuat dari Noer Halim terhadap Eisti'anah, terutama melalui jaringan yang dimilikinya.

Dukungan Noer Halim juga terbukti krusial dalam mendukung kemenangan Eisti'anah. Dengan jabatannya sebagai Ketua GAPENSI dan Ketua KONI, Noer Halim memiliki nama besar dan pengaruh substansial dalam dinamika politik di Kabupaten Demak. Kemenangan dalam kontestasi politik tidak terlepas dari strategi yang matang. Strategi politik ini bertujuan untuk mewujudkan semua rencana yang telah disusun, dengan fokus utama pada perolehan suara terbanyak. Ini melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman; perumusan faktor keberhasilan berdasarkan analisis tersebut; penetapan tujuan dan target yang terukur; evaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber

daya dan kondisi eksternal; hingga akhirnya pemilihan strategi paling sesuai yang mengantarkan kemenangan Eisti'anah pada Pilkada Demak 2020.

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan. Metode penelitian adalah suatu prosedur atau pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan studi (Darna dan Herlina, 2018: 288). Oleh karena itu, terdapat berbagai pilihan metode yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif dipilih. Creswell (2009), yang dikutip oleh Sugiyono (2013: 9), menjelaskan bahwa "penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan." Metode kualitatif digunakan untuk menghasilkan data yang kaya makna dan mendalam, tanpa menekankan generalisasi secara statistik. Data yang diperoleh akan dianalisis secara empiris untuk kemudian ditarik kesimpulan.

1.9.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis dan mendalam tentang suatu fenomena atau subjek penelitian. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek spesifik, mempelajarinya sebagai sebuah kasus (pendekatan studi kasus). Menurut Moleong (2005), yang dikutip oleh Zunitasari (2020: 30), pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif

digunakan untuk menganalisis suatu fenomena tanpa bertujuan untuk menarik kesimpulan yang bersifat generalisasi luas. Nazir (1983), dalam Ibrahim, dkk (2018: 46), menjelaskan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk "membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena yang diselidiki." Metode deskriptif ini digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, hingga peristiwa yang terjadi di masa sekarang (Nazir, 1983: 63, dalam Ibrahim, dkk, 2018: 46). Fungsi ini sangat relevan dalam penelitian ini, dengan kedalaman analisis data mencapai tingkat deskripsi variabel penelitian (Ibrahim, dkk, 2018: 46).

1.9.2. Situs Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Demak, sebuah daerah di mana Eisti'anah terpilih sebagai Bupati.

1.9.3. Subjek Penelitian

Narasumber sebagai subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013: 85), *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam kasus ini, subjek penelitian dipilih berdasarkan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai proses pencalonan dan kemenangan Eisti'anah dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Demak. Penggunaan teknik *purposive sampling* bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan dinamika lapangan sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun narasumber dalam penelitian ini meliputi:

1. Ibu dr. Hj. Eisti'anah, S.E. (Bupati Terpilih pada Pilkada 2020 di Kabupaten Demak)
2. Bapak KH. Ali Makhsun, M.Si. (Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada 2020 di Kabupaten Demak)
3. Bapak H. Sri Fahrudin Bisri Slamet, S.E. (Ketua DPC PDIP Kabupaten Demak)
4. Bapak Nasikun, S.Sos. (Bendahara DPD ASPEKNAS Jawa Tengah)
5. Bapak Suryo Hadi Wibowo, S.H., S.Kom. (Anak Noer Halim)
6. Bapak H. Mugiyono, M.H. (Calon Bupati pada Pilkada 2020 di Kabupaten Demak)
7. Salah satu warga di Kabupaten Demak

1.9.4. Jenis Data

Penelitian kualitatif ini memanfaatkan data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan narasumber terkait, serta data tertulis yang relevan dengan peran "orang kuat" di balik pencalonan Eisti'anah pada Pilkada 2020 di Kabupaten Demak.

1.9.5. Sumber Data

Jenis data penelitian ini terdiri dari:

1.9.5.1. Data Primer (*Primary Data*)

Menurut Sugiyono (2013: 137), sumber primer adalah "sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data." Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui pelaksanaan wawancara mendalam dengan narasumber yang

memiliki informasi langsung mengenai "orang kuat" di balik pencalonan Eisti'anah pada Pilkada 2020 di Kabupaten Demak.

1.9.5.2. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Sugiyono (2013: 137) mendefinisikan sumber sekunder sebagai "sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen." Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari situs-situs institusi resmi yang relevan, serta dari referensi buku, jurnal, karya ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1.9.6.1. Wawancara

Pengumpulan data melalui teknik wawancara merupakan proses pertukaran informasi dan ide untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu topik tertentu melalui pertemuan tatap muka (Esterberg, 2002, dalam Sugiyono, 2013: 231). Melalui wawancara mendalam, peneliti tidak hanya mengajukan pertanyaan tetapi juga berupaya menangkap makna dari pengalaman partisipan (Raco, 2010: 117). Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka (*open-ended*) dan fleksibel, namun tetap memiliki garis besar permasalahan (Raco, 2013: 119).

1.9.6.2. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data melibatkan proses yang kompleks, terutama pengamatan dan pencatatan (Hadi, 1986, dalam Sugiyono, 2013: 145). Penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipan, di mana peneliti bertindak sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati (Sugiyono, 2013: 145). Oleh karena itu, data yang diperoleh tidak selalu mencapai tingkat makna tersembunyi di balik apa yang terlihat, terucap, dan tertulis (Sugiyono, 2013:145).

1.9.6.3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan mengenai peristiwa di masa lampau (Sugiyono, 2013: 240). Hasil pengumpulan data melalui wawancara akan menjadi lebih kredibel jika didukung oleh dokumen-dokumen yang relevan (Sugiyono, 2013: 240). Dokumen ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya lainnya (Sugiyono, 2013: 240). Dalam penelitian ini, pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi terkait "orang kuat" di balik pencalonan Eisti'anah pada Pilkada 2020 di Kabupaten Demak dalam bentuk dokumen dan arsip.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif sebagai hasil akhir. Bogdan, dalam Sugiyono (2013: 244), menjelaskan analisis data sebagai "proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain." Analisis data di lapangan mengikuti model Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif, yang dilakukan selama dan setelah pengumpulan data pada periode tertentu, meliputi "data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification" (Sugiyono, 2013: 246).

Reduksi data (*data reduction*) berarti meringkas dan memilah data dengan memfokuskan pada poin-poin utama dan penting, mencari tema dan polanya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas (Sugiyono, 2013: 247). Selanjutnya, dalam penyajian data (*data display*) pada penelitian kualitatif, Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa bentuk penyajian yang paling sering digunakan adalah teks naratif (Sugiyono, 2013: 249). Realitas yang ditemukan di lapangan kemudian dihubungkan dengan dasar teori untuk selanjutnya dilakukan penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

1.9.8. Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Pengujian kredibilitas atau keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode triangulasi. Menurut Sugiyono (2013: 273), triangulasi diartikan sebagai pemeriksaan ulang data yang diperoleh dari beragam sumber, dengan berbagai cara, dan pada berbagai waktu. Teknik ini bertujuan untuk memverifikasi keabsahan data yang telah dikumpulkan. Sugiyono (2013: 274) mengemukakan tiga jenis triangulasi: Triangulasi sumber: Uji kredibilitas data dilakukan dengan pengecekan dari beberapa sumber berbeda. Triangulasi teknik: Pengecekan data dari sumber yang sama menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.

Triangulasi waktu: Uji keabsahan data dengan menggunakan beragam teknik dalam waktu atau situasi yang berbeda-beda.

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber akan digunakan. Uji kredibilitas keabsahan data ini dipilih untuk memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai narasumber wawancara yang menjadi sumber informasi utama. Hal ini dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa data yang didapatkan dari wawancara dengan narasumber yang berbeda.